

yang Pergi dan yang Tinggal: Strategi Sipil Aceh Saat Konflik dalam Novel Arafat Nur

Alpi Anwar Pulungan¹

Taufik Dermawan²

Azizatuz Zahro³

¹²³ Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Indonesia

¹ anwaralpi18@gmail.com

² taufik.dermawan.fs@um.ac.id

³ azizatuz.zahro.fs@um.ac.id

Abstrak

Strategi sipil Aceh membuktikan bahwa tidak ada pilihan yang mudah saat konflik berkepanjangan terjadi. Kendati pun faktor keamanan menjadi faktor terbesar pelarian, ternyata primordialisme (rasa senasib sepenanggungan) mampu mengalahkan faktor keamanan dan ekonomi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra dan dibantu teori strategi sipil ini bertujuan untuk mengetahui strategi sipil Aceh dalam melalui konflik GAM-RI. Untuk mendapatkan data berupa kutipan teks novel yang memuat konsep pelarian, dukungan, dan suara warga sipil saat terjadinya konflik dilakukan teknik kepustakaan, baca, dan catat. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelarian dimotivasi oleh faktor keamanan dan ekonomi sehingga warga sipil yang memilih menetap akan mengalami kendala di kedua faktor tersebut. (2) Mendukung GAM dimotivasi faktor cinta dan primordialisme, sedangkan mendukung aparat militer dimotivasi faktor keamanan dan ekonomi. Mendukung GAM berarti mendapatkan siksaan dari pihak militer dan mendukung militer berarti siap dimusuhi oleh mayoritas masyarakat sipil. (3) suara tidak terdengar karena tingginya represifitas militer. Bersuara dan memilih diam tetap mendapatkan berbagai tindakan kekerasan, bahkan bisa saja dibunuh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik sipil seringkali merugikan dan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah.

Kata Kunci: *civil strategy, Aceh conflict, Arafat Nur*

Pendahuluan

Konflik Aceh (1976-2005) antara GAM dan Pemerintah Indonesia bukanlah sebuah ruang kosong yang muncul dengan sendirinya. Namun, lahir dari rentetan kekecewaan di masa lalu dan menjadi bom waktu akibat dari penyelesaian konflik Darul Islam yang belum tuntas serta kegagalan pendekatan dalam penanganan gerakan separatisme. Beberapa kekecewaan tersebut, yaitu (1) ketika Soekarno bertemu dengan Teungku Daud Beureueh untuk mengumpulkan dana pembelian pesawat terbang Seulawah RI-001 dan Dakota RI-002, kemudian meminta rakyat Aceh untuk berperang melawan Belanda dengan imbalan Aceh dibolehkan menjalankan syariat Islam. Namun, janji tersebut pada akhirnya hanya menjadi sebuah kebohongan dan pengkhianatan, (2)

berlakunya UU No. 5/1974 yang mencabut keistimewaan Aceh di bidang agama, adat-istiadat, dan pendidikan, serta (3) eksploitasi kekayaan alam Aceh oleh Pemerintah Pusat (Nurhasim, 2008, hlm. 76). Heger & Neumayer (2022) menambahkan bahwa referendum Timor Timur yang diizinkan merdeka berdasarkan hasil jajak pendapat telah menjadi efek simbolis dan keinginan mencontoh oleh tokoh-tokoh Aceh.

Selama terjadinya konflik GAM-Pemerintah Indonesia, telah diadakan berbagai operasi militer, yaitu DOM (1989-1998), Operasi Wibawa (2 Januari 1999), Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999-Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II (Februari 2000-Mei 2000), Operasi Sadar Rencong III (Juni 2000-18 Februari 2001), Operasi Pasukan Penindak Rusuh Massa-PPRM tahun 1993, Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000-2001), dan Operasi Cinta Damai (2001-2002). Selama operasi tersebut dilangsungkan, telah terjadi pembunuhan, penyiksaan, penculikan, pemerkosaan, dan kejahatan yang melanggar HAM lainnya. Berbagai tragedi terkenal yang terjadi, seperti tragedi Alue Nireh, tragedi Kluet Utara, tragedi Peudada, tragedi Simpang KKA, tragedi Idi Cut, tragedi Gedung KNPI, tragedi Rumoh Geudong, dan tragedi Jamboe Keupok. Diperkirakan 30.000 orang tewas dan hampir 350.000 orang terluka selama konflik GAM-RI (1976-2005) (MSR, 2009).

Rahmany P (2001, hlm. 140) menyatakan bahwa pada masa DOM sebenarnya anggota GAM sudah habis disebabkan repesifitas militer yang begitu tinggi. Berbagai hal dilakukan demi tetap berlangsungnya Operasi Jaring Merah di Aceh. Orang-orang pun kemudian dituduh lalu diburu sebagai anggota GAM. Fenomena *cuak* (Tenaga Pembantu Operasi) semakin berkembang dan rentan disalahgunakan. Para TPO diberikan peran, wewenang, sarana, dan perlindungan dari aparat militer untuk menjadi pengawas berbagai kegiatan penduduk desa. Pada fase ini juga banyak warga sipil Aceh yang melarikan diri dari konflik karena takut dituduh sebagai pemberontak dan berakhir di kamp penyiksaan. Mereka berpindah dari desa ke kota, perkotaan ke perdesaan, bahkan ke luar negeri, secara massal, individual, dalam jangka waktu sementara, dan permanen. Perpindahan dan keterlibatan warga sipil sebagai *cuak* juga dapat dikatakan sebagai strategi sipil untuk bertahan di tengah gejolak konflik.

Strategi sipil merupakan sebuah studi klasik Hirschman (1978) yang terdiri dari tiga kategori, yaitu *exit*, *voice*, dan *loyalty*. Namun, Barter (2014, hlm. 14) lebih memilih urutan *exit*, *loyalty*, dan *voice*. Setidaknya terdapat tiga kategori strategi sipil yang dapat ditemukan dalam setiap perang sipil, yaitu penerbangan atau melarikan diri (*exit*), mendukung satu atau lebih kelompok bersenjata (*loyalty*), dan bersuara (*voice*).

Strategi pertama adalah penerbangan atau dapat dimaknai sebagai pelarian dan pengasingan. Penerbangan menjadi pilihan paling konkret sekaligus mahal dan sulit karena menimbulkan risiko besar dan tidak ada jaminan akan selamat serta berhasil. Penerbangan bukan sebuah keputusan tunggal dan sederhana, setidaknya terdapat enam keputusan dilematis yang harus diambil ketika hendak melakukan strategi penerbangan. Dilema pertama tentunya adalah pergi atau bertahan. Kedua, kapan harus pergi. Ketiga, bagaimana cara pergi. Keempat, apa yang harus dibawa. Kelima, ke mana harus pergi, dan keenam, berapa lama melarikan diri (Barter, 2014, hlm. 14).

Strategi kedua adalah dukungan. Warga sipil yang tidak bisa melarikan diri akan memilih memberikan dukungan kepada salah satu atau lebih kelompok bersenjata. Dukungan tersebut meliputi dukungan simbolis, menghadiri pertemuan, penyediaan barang, informasi, tenaga kerja, mengangkat senjata, memata-matai, dan menutup mata terhadap berbagai aktivitas kelompok bersenjata. Pemberian barang seperti makanan,

uang, tempat tinggal, dan kendaraan menjadi bentuk dukungan paling konkret dan langsung. Menjadi netral pun pada akhirnya bukan sebuah pilihan dan justru lebih banyak merugikan. Strategi dukungan ini menunjukkan bahwa warga sipil tidak melulu sebagai korban, tetapi dapat menjadi seorang aktor pasif dalam sebuah perang atau konflik (Barter, 2014, hlm. 17).

Strategi ketiga adalah suara. Hirschman (1978) menganggap suara sebagai mata uang politik sehingga terkadang jauh lebih berhasil daripada melakukan perlawanan dengan senjata. Sebagai sebuah pandangan independen warga sipil, strategi suara kurang efektif dalam menyelamatkan warga karena harus melewati proses yang cukup panjang yang tidak jarang harus mengorban waktu, tenaga, bahkan juga nyawa. Selain itu, suara seperti apa yang diperlukan, bentuk potensinya, dan orang yang dapat memanfaatkannya menjadi beberapa kesulitan dalam menggunakannya. Suara tidak terlalu memungkinkan dilakukan mengingat tingginya represifitas militer saat terjadinya sebuah konflik. Lewat komunitas diaspora, pengungsi dan kelompok masyarakat sipil dapat bersuara dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di kampung halaman.

Dalam bahasa Hirschman, keputusan untuk mengasingkan diri (*exit*) merupakan gejala dan akibat dari hilangnya kesetiaan (*loyalty*) terhadap negara yang mengkhianati warga negaranya sendiri. Keluar (*exit*) berarti bersuara (*voice*) dan melarikan diri ke pengasingan adalah konsekuensi dari kehilangan suara. Orang yang keluar karena telah dibungkam oleh negara akan semakin sulit bersuara di pengasingan. Sebuah argumen Hirschman dari pengalaman hidupnya sendiri tentang pelarian dan pengasingan, yakni seseorang tidak memerlukan suara untuk perubahan apabila pilihan keluar (*exit*) sudah tersedia dan kesetiaan (*loyalty*) telah sangat dilemahkan bahkan dihancurkan. Hirschman melihat bahwa pelarian menjadi pilihan utama dan berada di atas pilihan lainnya (Heins, 2020).

Potret strategi sipil Aceh dalam konflik GAM-Pemerintah Indonesia terdokumentasi dengan baik pada novel-novel karya Arafat Nur. Sebagai sastrawan sekaligus korban dan saksi hidup konflik Aceh, Arafat Nur bahkan telah melakukan ketiga kategori strategi sipil tersebut. Pertama, Arafat Nur telah melakukan pelarian diri atau pengasingan dari Aceh menuju Ponorogo-Jawa Timur. Bahkan Arafat Nur menikahi perempuan Jawa dan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo. Kedua, Arafat Nur lewat karyanya secara tegas memprotes kolonialisasi Jawa di Aceh dan cenderung mendukung GAM, meskipun tidak secara langsung dan konkret. Ketiga, Arafat Nur menyuarakan luka orang Aceh lewat karya-karyanya yang berhasil memenangkan berbagai sayembara dan penghargaan. Hal inilah yang membuat Pulungan (2023) menyebut Arafat Nur sebagai sastrawan yang memiliki strategi sekaligus mengalami ambiguitas.

Realitas fiksi dalam novel Arafat Nur begitu dekat dengan realitas faktual, sebagaimana Swingewood memandang karya sastra sebagai sebuah cerminan langsung dari kehidupan, seperti struktur sosial, hubungan kekeluargaan, konflik kelas, dan budaya dengan karya sastra sebagai penghubung imajinernya. Swingewood membagi tiga konsep pendekatan sosiologi sastranya, yaitu (1) sastra sebagai refleksi atau cerminan zaman, (2) kepengarangan dan produksi, serta (3) sejarah dan karya sastra (Wahyudi, 2013). Penelitian ini akan berfokus pada konsep sastra (novel-novel Arafat Nur) sebagai refleksi atau cerminan zaman (konflik Aceh-RI). Konsep tersebut sesuai karena sastra bersumber, tumbuh, dan berkembang di lingkungan masyarakat.

Penelitian tentang strategi sipil Aceh dalam novel-novel karya Arafat Nur belum pernah dilakukan. Penelitian terhadap novel-novel Arafat Nur masih berfokus seputar kekerasan, seperti yang dilakukan oleh (Rismawati, 2019);(Sunarto dkk., 2021), seputar konflik politik oleh (Latifah & Sugiarti, 2019);(Raihana dkk., 2023), dan terbaru seputar wisata sastra kelam (*dark tourism*) oleh (Pulungan dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa strategi sipil belum mendapat perhatian khusus dan luput dari perhatian peneliti sastra. Padahal, sebagaimana yang dilaporkan oleh Mißbach (2012, hlm. 35–36) jumlah orang Aceh (legal maupun ilegal) selama 2003-2005 berkisar 70 sampai 120 ribu orang di Malaysia, di Denmark sekitar 250 orang, Norwegia sekitar 200 orang, Swedia sekitar 100 orang, Amerika Serikat sekitar 400 orang, dan Australia sekitar 200 orang. Bahkan pengakuan seorang korban kekerasan di Aceh yang melarikan diri ke Malaysia lebih memilih menyerahkan diri ke polisi Malaysia dan dipenjarakan di sana daripada di Aceh.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terbaru yang belum pernah diteliti dengan sumber data yang lebih luas. Selain itu, di tengah impunitas pelaku kejahatan kemanusiaan di Aceh, bantuan yang sangat sedikit dan belum merata membuat penelitian ini penting dan relevan untuk dilakukan. Sebuah pertanyaan pun dapat diajukan, yaitu mengapa saat konflik Aceh terjadi ada yang pergi dan ada yang tinggal?? Lantas apa pula yang terjadi dengan warga sipil yang memilih bertahan? Penelitian ini akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan teori strategi sipil.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan orientasi teoretis berupa teori sosiologi sastra dan dibantu teori strategi sipil. Data berupa kutipan teks dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf dalam novel yang memuat potret pelarian, dukungan, dan suara warga sipil Aceh saat terjadinya konflik. Sumber data penelitian ini adalah tiga novel karya Arafat Nur, yaitu (1) *Seumpama Matahari*, (2) *Lampuki*, dan (3) *Kawi Matin di Negeri Anjing*. Ketiga karya tersebut dipilih karena secara lengkap mendeskripsikan potret konflik Aceh pra-MoU Helsinki, diceritakan dari sudut pandang kombatan GAM dan warga sipil, serta dua novel terakhir berhasil memenangkan sayembara DKJ dan Basabasi. Data dikumpulkan dengan penggunaan teknik kepustakaan, baca, dan catat. Kemudian data dikumpulkan lewat pembacaan sumber data secara intensif dan kodifikasi data. Analisis data diawali dengan reduksi data, sajian data, simpulan, dan verifikasi. Analisis pada penelitian ini berupaya untuk menjawab masalah penelitian seputar pelarian, dukungan, dan suara warga sipil saat konflik, kemudian menyimpulkan hasilnya. Untuk pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan triangulasi data dan sumber.

Hasil

Exit

Di Indonesia dikenal istilah yang menyangkut tinggal di luar kampung halaman atau tanah air untuk sementara waktu, yaitu merantau dan hijrah. Golongan migran ekonomi biasanya akan mengidentifikasi diri mereka sebagai perantau dan golongan ulama menyebutnya hijrah (Mißbach, 2012, hlm. 17). Siegel menyebutkan bahwa di kalangan laki-laki Minangkabau dan Aceh, merantau adalah adat tradisional. Semasa konflik Aceh dengan Belanda, Jepang, dan Pemerintah Indonesia, banyak rakyat Aceh yang mengungsi ke luar negeri, terutama di awal 1990-an dan pascapengumuman Darurat Militer pada 2003 (Mißbach, 2012, hlm. 18).

Beberapa faktor penentu utama migrasi masyarakat Aceh adalah bentrokan konflik secara besar-besaran, khususnya desa-desa di kabupaten dan faktor sosial-ekonomi. Kemudian faktor keamanan, seperti hadirnya aparat militer di desa dapat mengurangi atau memicu imigrasi. Begitu juga dengan kehadiran etnis Jawa telah menyebabkan arus keluar yang signifikan dengan adanya intimidasi dari kelompok GAM. Selain itu, perpindahan masyarakat Aceh juga merupakan determinan migrasi tradisional (Czaika & Kis-Katos, 2009)

Data 1:

Kami berusaha menyingkir dari Aceh. Tak sanggup lagi menghadapi kekerasan dan senjata (Nur, 2017, hlm. 73).

Kutipan tersebut menunjukkan tokoh Putri dan Ana yang sudah tidak memiliki orang tua terpaksa melarikan diri ke Riau karena sudah tidak tahan melihat berbagai penyiksaan akibat dari konflik bersenjata. Melarikan diri digunakan oleh kedua tokoh tersebut sebagai upaya mempertahankan hidup. Hal ini menunjukkan telah terjadi pelarian secara terpaksa dan faktor keamanan menjadi alasan dibalik sebuah pelarian. Pelarian dalam negeri dan begitu dekat dengan Aceh mengindikasikan bahwa pelarian hanya dalam jangka waktu singkat dan bersifat sementara.

Kekhawatiran keamanan merupakan motivator utama pelarian bagi warga sipil biasa Aceh. Ada yang tinggal bersama keluarga untuk waktu yang singkat, ada yang tinggal di kamp berukuran sedang setelah rumah mereka dihancurkan, dan ada yang dipindahkan secara paksa ke kamp pemerintah. Bagi warga sipil yang melarikan diri untuk waktu yang singkat, rasa tidak aman menjadi alasan utama pelarian. Keluarga mendengar suara tembakan, desas-desus tentang serangan yang tertunda, atau memiliki alasan lain untuk percaya bahwa masalah akan datang (Barter, 2014, hlm. 94).

Selain masalah keamanan, pelarian juga dipengaruhi oleh migrasi ekonomi. Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten di Aceh tumbuh lebih cepat pada masa damai dibandingkan saat perang (Heger & Neumayer, 2022). Ekonomi yang hancur akibat konflik berkepanjangan telah memotivasi pelarian. Tidak banyak pekerjaan yang dapat dilakukan saat terjadinya konflik. Bahkan harga bahan pokok akan naik berlipat-lipat saat konflik memuncak. Sementara itu, bagi warga sipil yang mengungsi untuk tinggal bersama kerabat, faktor ekonomi tidak begitu penting. Namun, terkadang pelarian juga melibatkan biaya ekonomi yang parah. Seseorang harus membayar biaya pelarian. Terlebih saat gagal mendapatkan pekerjaan di tempat tujuan dan pada akhirnya kembali hidup dalam kemiskinan (Barter, 2014, hlm. 98). Pada 1990-an, biaya perjalanan kapal dari Aceh ke Malaysia sekitar Rp500.000 dan Rp1.000.000. Harga tersebut akan semakin melambung seiring konflik yang semakin parah. Biaya

yang tinggi tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Di awal 1990-an setidaknya terdapat puluhan orang Aceh yang dipenjarakan di Malaysia karena masuk secara ilegal dan didakwa Undang-Undang Imigrasi 1959/1963 (UU 155). Begitu juga dengan rombongan kapal dari Aceh yang dihantam badai dan diselamatkan nelayan Thailand (Mißbach, 2012, hlm. 64–65).

Data 2:

Sejak saat itu, hampir tidak ada penduduk Aceh yang tidak merasakan pukulan, tendangan lars, dan hantaman pangkal bedil tentara, seolah-olah tugas utama serdadu di negara ini hanya untuk memukuli dan menyiksa rakyat... (Nur, 2020, hlm. 40).

Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana kekerasan yang dialami oleh warga sipil selama terjadinya konflik. Kekerasan akan terus dialami warga sipil yang tetap memilih bertahan di kampung halamannya. Pasukan Pemerintah Indonesia memandang warga sipil sebagai calon pendukung keuangan dan logistik GAM, sehingga setiap orang Aceh memiliki resiko mendapatkan kekerasan (Strandh & Yusriza, 2021). Kutipan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian IOM yang menyatakan bahwa 78% warga Aceh mengalami perang. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini menjadi salah satu faktor pendorong warga sipil untuk melakukan pelarian. Misalnya Mardi. Ketika di usia 22 tahun, Mardi bekerja di sebuah toko kecil. Saat mengangkut kiriman beras mingguan, Mardi dihentikan dan dituduh membawakan makanan untuk para pemberontak. Setelah dipukuli dan berasnya disita, Mardi dibantu pengusaha lokal lari ke Malaysia (Barter, 2014, hlm. 61).

Berbagai pelanggaran HAM saat terjadinya DOM dapat dibagi menjadi enam bentuk, yaitu (1) pembunuhan kilat, (2) penyiksaan dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi, (3) penghilangan secara paksa, (4) penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, (5) perusakan hak milik, dan (6) perkosaan dan kekerasan seksual (Rahmany P, 2001, hlm. 36). Begitu juga dengan penemuan dua kuburan massal (bukit tengkorak) yang berisi 50 korban pembantaian militer di Desa Blang Gleum Arakundo, Kecamatan Sulok dan di Desa Alue Mirah, Kecamatan Simpang Ulim (Al-Chaidar dkk., 1998, hlm. 105).

Data 3:

Orang-orang bersenjata itu sangat membenci roman lelaki... Maka, jumlah lelaki di sejumlah kampung pun makin hari kian berkurang. Mereka yang masih punya kesempatan, melarikan diri ke kota-kota lain, memilih untuk menjadi pendatang haram di negeri-negeri jiran. Beberapa lelaki malang yang tidak berdaya, harus tetap tinggal untuk melindungi dan menafkahi keluarganya, yang kemudian mereka malah menjadi sasaran kekerasan dan korban keganasan senjata (Nur, 2019, hlm. 25).

Mayoritas warga sipil yang melakukan pelarian adalah laki-laki. Laki-laki kerap mendapat penyiksaan dari aparat militer karena dituduh sebagai pemberontak atau mata-mata. Sementara itu, kamp-kamp pengungsian kebanyakan adalah perempuan. Faktor budaya membantu menjelaskan mengapa perempuan Aceh lebih kecil kemungkinannya untuk melarikan diri sejauh, sesering, dan selama laki-laki. Perempuan Aceh memiliki ikatan budaya yang kuat dengan kampung halamannya. Perempuan memiliki rumah (*njang po rumoh*) yang diberi oleh orang tua mulai dari menikah hingga melahirkan anak pertama atau terkadang dalam jangka tiga tahun. Kemudian diberi rumah sepenuhnya setelah melakukan pesta kecil (*chanduri*) sebagai perpisahan (*geumeukleh*) dengan orang tuanya. Perempuan tumbuh dan menetap selamanya di

rumah orang tuanya. Sementara itu, orang tuanya pindah di rumah yang sudah dibangun yang biasanya di dekat rumah putrinya (Siegel, 1969, hlm. 51–52). Berbeda halnya dengan laki-laki yang kurang terikat dengan desanya. Begitu memasuki masa pubertas, laki-laki biasanya akan meninggalkan rumah ibunya dan tinggal di meunasah. Setelah menikah, laki-laki ikut tinggal di kampung halaman istrinya dengan hanya membawa tangan kosong. Kemudian para lelaki akan merantau untuk mendapatkan pekerjaan dan menghidupi keluarganya (Siegel, 1969, hlm. 54).

Kematian dan hilangnya laki-laki Aceh sangat membebani perempuan Aceh (Lee-Koo, 2012). Konflik berkepanjangan tersebut telah menciptakan jumlah janda perang yang sangat tinggi, bahkan mengubah demografi beberapa desa, seperti Desa Cot Keng (Strandh & Yusriza, 2021). Perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan di Pidie bahkan sangat mencolok. Pada tahun 1990 terdapat 216.477 perempuan dan 204.900 laki-laki. Pada 1996 terdapat 238.012 perempuan dan 219.533 laki-laki. Pada tahun 1997 terdapat 239.547 perempuan dan 220.844 laki-laki. Bahkan pertumbuhan penduduk Pidie pada tahun 1990 dan 1991 hanya 0,4% di saat pertumbuhan penduduk nasional rata-rata adalah 2%. Hal ini diyakini bukan keberhasilan program KB melainkan besarnya angka kematian dibandingkan kelahiran, dan ditambah banyak yang merantau, baik yang terpaksa maupun sukarela (Al-Chaidar dkk., 1998, hlm. 100).

Data 4:

Empat tahun kemudian perumahan kembali kosong, tidak seorang pun dari mereka bersedia menempati rumah-rumah itu akibat sekelompok orang yang naik ke gunung kerap turun dan menimbulkan kekacauan. Orang-orang yang oleh pemerintah dituding hidungnya sebagai pemberontak itu tidak senang dengan kehadiran para penghuni kompleks yang mereka anggap sebagai bagian dari kumpulan kaum terjajah (Nur, 2019, hlm. 8).

Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana para pendatang, khususnya orang Jawa terus diteror oleh pemberontak. Hal ini menunjukkan apa yang terjadi pada kelompok minoritas saat terjadinya konflik. Pemandangan paling drastis juga dialami oleh masyarakat Jawa. Pada tahun 2002, ada lima kali lebih banyak orang yang mengungsi akibat konflik tinggal di Sumatra Utara daripada di Aceh, yang sebagian besar beretnis Jawa. Kehadiran orang Jawa memiliki korelasi tertinggi dengan pengungsian. Bahkan pada tahun 1999, GAM memasang pengumuman yang menuntut agar semua orang Jawa harus pergi. Menjelang september 2002, diperkirakan 178 ribu orang Jawa telah meninggalkan Aceh, sebagian besar menuju Sumatra Utara. Lari adalah aturan bagi orang Jawa di Aceh (Barter, 2014, hlm. 65).

Loyalti

Saat terjadinya konflik Aceh, dukungan untuk salah satu pihak umumnya didasarkan pada wilayah etnis dan zona kontrol. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barter (2014, hlm. 62) bahwa umumnya kelompok minoritas akan memberikan dukungan kepada pemerintah, seperti masyarakat Gayo melakukan perlawanan anti-GAM dan sebaliknya kelompok mayoritas masyarakat Aceh akan mendukung GAM. Sudah sejak lama juga bahwa masyarakat Gayo diasingkan oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Gayo mengibarkan bendera Indonesia dan memberikan informasi kepada tentara. Selain itu, dukungan kepada negara juga banyak dilakukan oleh masyarakat di perkotaan (Barter, 2014, hlm. 66). Daerah-daerah minoritas anti-GAM menampilkan grafiti dan protes anti-GAM, menolak membayar pajak GAM, menyebarkan gosip tentang GAM koruptor, kasar,

tidak Islami, dan Barat, khususnya tentang hubungan pemimpin GAM Hasan Tiro dengan istri Yahudinya (Barter, 2014, hlm. 81).

Data 5:

Seorang prajurit bertanya datar, “apakah kalian melihat pemberontak berkeliaran di sini?” (Nur, 2019, hlm. 97).

Kutipan tersebut menunjukkan salah satu dukungan warga sipil terhadap kombatan GAM dengan tidak memberitahukan keberadaan kombatan GAM kepada tentara. Pada hari itu, dua truk tentara berhenti di kedai dan menyanjai orang-orang. Warga mengaku tidak melihat, padahal di kedai tersebut ada tiga kombatan dan salah satunya adalah komandan. Selain itu, dukungan warga sipil juga diberikan dalam bantuan memata-matai tentara, sebagaimana terlihat pada kutipan berikut.

Data 6:

Kau tidak harus angkat senjata sekarang. Kau cukup memberi tahu lewat radio tentang gerak-gerik mereka (Nur, 2020, hlm. 111).

Dukungan tersebut tentunya sangat membantu kombatan GAM saat aparat militer terus berkeliaran. Terbukti dengan bantuan tersebut, pasukan serdadu yang memburu kelompok Suman selalu bernasib nahas. Korban selalu jatuh dari pihak tentara. Kelompok Suman bisa berkeliaran dengan leluasa dan melakukan serangan mendadak dari jarak dekat sewaktu musuh sedang lengah. Namun, biasanya kelompok militer akan langsung melakukan aksi balasan disertai peggededahan setiap kali terjadi penyerangan.

Bagi banyak orang Aceh, dukungan diberikan secara cuma-cuma. Tidak jarang warga sipil menyediakan tenaga kerja, pemandu, perawat, penyelundup, dan kurir. Begitu juga dengan dukungan kecil seperti menghadiri pertemuan, memberikan informasi, menampilkan simbol, dan menyebarkan gosip pro-GAM (Barter, 2014, hlm. 101). Begitu juga dengan penduduk desa di Bireuen menyatakan bahwa mengkritik GAM jauh lebih mudah daripada prajurit TNI. Orang-orang GAM tidak selalu menyukai kritik, tetapi mereka tidak akan menembak (Barter, 2014, hlm. 81).

Dukungan yang diterima oleh prajurit TNI berbeda dengan yang diterima oleh kombatan GAM. Dukungan yang dibutuhkan oleh aparat militer dari warga sipil tentunya adalah informasi, sedangkan lainnya tidak karena sudah memiliki berbagai fasilitas pendukung yang dibiayai negara, seperti tempat tinggal, makanan, pakaian. Sementara itu, kombatan GAM membutuhkan bantuan warga sipil berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa warga sipil yang mendukung kombatan GAM didasarkan atas primordialisme etnis, budaya, dan rasa senasib sepenanggungan, sedangkan warga sipil mendukung negara didorong oleh faktor ekonomi dan keamanan.

Gambaran warga sipil yang mendukung negara dapat dilihat pada Tenaga Pembantu Operasi (TPO) atau yang lebih dikenal dengan *cuak*. *Cuak* diberikan peran, wewenang, sarana, dan perlindungan yang cukup besar oleh aparat militer. Mulanya, *cuak* direkrut dari kelompok GAM untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari orang dalam yang mengenal medan dan sasaran. Perekrutan *cuak* biasanya secara terpaksa. *Cuak* awalnya adalah warga atau kombatan yang dituduh atau memang simpatisan GAM yang tertangkap dan mendapatkan siksaan. Tidak tahan mendapat siksaan yang lebih berat atau diiming-imingi pembebasan oleh aparat membuat para warga sipil atau kombatan menjadi *cuak*. Namun, ada juga *cuak* yang direkrut secara sukarela demi mendapatkan

keuntungan materi, kekuatan, dan kekuasaan terhadap penduduk desa (Rahmany P, 2001, hlm. 140).

Demi sukses menjalankan tugasnya, para *cuak* diberi fasilitas berupa gaji tiap bulan, diberi sepeda motor, disewakan rumah beserta perabotnya, uang rokok, bonus, dan diberi arloji serta seragam militer. Kedekatan para *cuak* dengan aparat militer kerap kali disalahgunakan, seperti terjadinya pemerasan kepada seseorang yang dituduh terlibat GAM. Jika orang yang dituduh tidak bisa memberikan uang atau barang yang diinginkan maka nyawa menjadi taruhan dengan cara dituduh sebagai anggota GAM. Selain itu, para aparat militer melalui *cuak* juga melakukan berbagai perampasan harta benda penduduk yang dituduh. Hal tersebut terjadi pada hampir semua korban Rumoh Geudong. Barang-barang yang dirampas, yaitu jam tangan, perhiasan emas, uang, *chain shaw*, ternak kerbau dan sapi, sepeda motor hingga mobil, bahkan SK PNS (Rahmany P, 2001, hlm. 142–143).

Voice

Suara merupakan strategi sipil paling buram. Kekerasan atau ketidakamanan menyebabkan ketiadaan suara, memaksa warga sipil untuk diam, dan beralih ke bentuk suara yang lebih pelan. Namun, warga sipil terus mengeskpresikan diri melalui berbagai bentuk perlawanan sehari-hari, seperti gosip dan fitnah. Bagaimana suara sipil yang tetap memilih untuk bertahan sulit untuk dijelaskan.

Data 7:

Mayat pemuda itu dicampakkan ke sungai yang menyebabkan sebagian air keruhnya memerah. Pasar menjadi kosong. Kedai-kedai terbuka tanpa manusia, pemiliknya bersembunyi jauh dari sana. Setiap kali serdadu melepaskan tembakan, tubuh mereka yang bersembunyi bergetar-getar. ... Orang-orang yang mati dalam perang itu dikuburkan diam-diam, kemudian menyisakan luka mendalam di hati sanak keluarga (Nur, 2020, hlm. 91).

Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana orang-orang yang mengetahui terjadinya sebuah pembunuhan tidak bisa bersuara, tidak berdaya untuk menolong. Bahkan mayatnya dikuburkan secara diam-diam. Faktor keamanan menjadi penyebab orang-orang di pasar dan di kedai-kedai tidak berani membantu. Menunjukkan diri saja dapat membuat nyawa melayang.

Berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia menjadi sebuah *shock therapy*, membungkam suara warga sipil Aceh. Orang-orang yang dibawa ke Rumoh Geudong selepas disiksa juga akan diancam agar tidak menceritakan apa yang terjadi kepada siapa pun. Ketidakberanian warga sipil untuk bersuara juga dipengaruhi banyaknya *cuak* yang berbaur dengan warga. Para *cuak* berasal dari berbagai jenis pekerjaan, seperti petani, kepala desa, sekretaris desa, pegawai negeri sipil, kontraktor, pedagang, dan purnawirawan. Pasca dicabutnya DOM, penembakan misterius banyak terjadi pada *cuak*. Hal tersebut terjadi untuk pelenyapan para informan yang dikhawatirkan akan menjadi saksi hidup pelanggaran HAM di Aceh yang dilakukan oleh aparat militer selama pemberlakuan DOM (Rahmany P, 2001, hlm. 147).

Berbagai bentuk teror yang dilakukan oleh militer untuk membungkam suara warga sipil adalah (1) eksekusi terhadap tertuduh kombatan GAM di tempat-tempat umum, (2) masyarakat diharuskan menyaksikan eksekusi secara sadis dan brutal, (3) membuang mayat hasil eksekusi di pinggir jalan dan tempat umum, (4) mempertontonkan potongan-potongan tubuh, (5) mengintimidasi masyarakat yang memberi bantuan

kepada GAM, (6) mengumpulkan masyarakat di balai desa dan kemudian menggeledah rumahnya, (7) melakukan penculikan, (8) menghukum seluruh penduduk apabila ada satu penduduk yang melanggar, (9) pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, (10) menyuruh seluruh warga melakukan penganiayaan terhadap orang yang dianggap bersalah oleh militer (Rahmany P, 2001, hlm. 20–21). Begitu juga dengan pendirian Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis) yang digunakan untuk mengontrol kehidupan penduduk secara ketat telah mematikan suara warga sipil yang bertahan di Aceh (Rahmany P, 2001, hlm. 26).

Suara protes warga sipil yang tetap bertahan di Aceh adalah pembakaran Rumoh Geudong oleh massa pada 20 Agustus 1998, tepatnya dua minggu setelah pencabutan DOM di Aceh. Kemudian seorang perempuan muda yang mengkritik prajurit TNI. Pada 1998-1999, puluhan ribu warga sipil ikut serta dalam pemogokan dan protes menentang penyalahgunaan militer dengan mengibarkan bendera PBB (Barter, 2014:78). Begitu juga pada Juni 2003, terjadi protes besar-besaran oleh 180 kepala suku dan mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap Darurat Militer (Barter, 2014, hlm. 81).

Sementara itu, suara warga sipil yang hidup dalam pengasingan juga tidak terdengar. Meskipun bagi Hirschman (1970) keluar atau melarikan diri termasuk memberikan suara. Alih-alih bersuara, orang-orang yang melarikan diri masih berjuang untuk hidup di daerah atau bahkan negara orang lain. Orang Aceh yang sudah lebih dahulu tiba di pengasingan akan membantu dalam pencarian pekerjaan dan tempat tinggal. Keterlibatan dengan memberi bantuan tersebut juga dapat dianggap sebagai sebuah bentuk suara.

Simpulan

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada strategi sipil yang mudah dilakukan. Melarikan diri dimotivasi oleh faktor keamanan dan ekonomi. Warga sipil yang berhasil melarikan diri masih harus berjuang mendapatkan kehidupan, sedangkan warga sipil yang memilih bertahan demi keluarga terus mendapatkan berbagai tindakan kekerasan. Sementara itu, mendukung GAM sama sekali tidak dipengaruhi oleh faktor keamanan dan ekonomi, tetapi karena cinta dan rasa senasib sepenanggungan yang masih tinggi. Mendukung aparat militer dimotivasi oleh faktor ekonomi dan keamanan, baik secara terpaksa maupun secara sukarela, sedangkan mendukung GAM berarti siap untuk disiksa militer. Di sisi lain, mendukung TNI juga harus siap untuk dikucilkan dan dimusuhi oleh mayoritas masyarakat Aceh. Begitu juga dengan bersuara bisa saja terbunuh dan memilih diam semakin mendapatkan kekerasan. Penelitian selanjutnya disarankan mengambil data yang lebih luas sehingga dapat dijadikan sebagai narasi sanding dan banding penelitian ini, seperti novel berlatar konflik Aceh dari sastrawan lain. Pembahasan mengenai memori, transmisi memori, baik itu trauma dan pemaafan antara yang pergi dan yang tinggal menarik untuk dilakukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti bahwa perang saudara kerap kali mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah.

Daftar Pustaka

- Al-Chaidar, Ahmad, S. M., & Dinamika, Y. (1998). *Aceh bersimbah darah: Mengungkap penerapan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, 1989-1998* (Cet. 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Barter, S. J. (2014). *Civilian Strategy in Civil War: Insight from Indonesia, Thailand, and the Philippines*. Palgrave Macmillan.
- Czaika, M., & Kis-Katos, K. (2009). Civil Conflict and Displacement: Village-Level Determinants of Forced Migration in Aceh. *Journal of Peace Research*, 46(3), 399–418. <https://doi.org/10.1177/0022343309102659>
- Heger, M. P., & Neumayer, E. (2022). Economic legacy effects of armed conflict: Insights from the civil war in Aceh, Indonesia. *Conflict Management and Peace Science*, 39(4), 394–421. <https://doi.org/10.1177/0738894221994503>
- Heins, V. M. (2020). Can the refugee speak? Albert Hirschman and the changing meanings of exile. *Thesis Eleven*, 158(1), 42–57. <https://doi.org/10.1177/0725513619888666>
- Hirschman, A. O. (1978). Exit, Voice, and the State. *World Politics*, 31(1), 90–107. <https://doi.org/10.2307/2009968>
- Latifah, S., & Sugiarti. (2019). Representasi Politik Lokal Aceh dalam Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur. *SALINGKA*, 16(2), 105-114. https://www.researchgate.net/publication/340543090_Representasi_Politik_Lokal_Aceh_Dalam_Novel_Tanah_Surga_Merah_Karya_Arafat_Nur
- Lee-Koo, K. (2012). Gender at the Crossroad of Conflict: Tsunami and Peace in Post-2005 Aceh. *Feminist Review*, 101(1), 59–77. <https://doi.org/10.1057/fr.2011.54>
- Mißbach, A. (2012). *Politik jarak jauh diaspora Aceh: Suatu gambaran tentang konflik separatis di Indonesia*. Penerbit Ombak.
- MSR. (2009). *Multi-stakeholder review of post-conflict programming in Aceh: Identifying the foundations for sustainable peace and development in Aceh (Vol. 2) : Full report* [Text/HTML]. World Bank. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/716601468259763959/Full-report>
- Nur, A. (2017). *Seumpama Matahari*. Diva Press.
- Nur, A. (2019). *Lampuki*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nur, A. (2020). *Kawi Matin di Negeri Anjing*. Basabasi.
- Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Pustaka Pelajar.
- Pulungan, A. A. (2023). Arafat Nur, Konflik Aceh, dan Ingatan Kesedihan Bersama. *OMONG-OMONG*. <https://omong-omong.com/arafat-nur-konflik-aceh-dan-ingatan-kesedihan-bersama/>
- Pulungan, A. A., Dermawan, T., & Zahro', A. (2022). Mengubah Luka Menjadi Destinasi Wisata: Menggali Potensi Dark Tourism dalam Novel Arafat Nur. *Seminar Daring Internasional Riksa Bahasa XVI*, 176-184. <http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/2629>
- Rahmany P, D. (2001). *Rumoh Geudong: Tanda Luka Orang Aceh*. LSPP.
- Raihana, Kasmi, H., & Nasution, W. (2023). Analisis Sosiopolitik dalam Novel Lampuki Karya Arafat Nur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, 4(1), 1–16. <https://jim.bbg.ac.id/pendidikan/article/view/1082>

- Rismawati. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Novel Arafat Nur. *Jurnal Metamorfosa*, 7(1), 59-74.
<https://ejournal.bbg.ac.id/metamorfosa/article/view/246>
- Siegel, J. T. (1969). *The Rope of God*. University of California Press.
- Strandh, V., & Yusriza, B. (2021). War Widows' Everyday Understandings of Peace in Aceh, Indonesia. *Journal of Peacebuilding & Development*, 16(1), 102-106.
<https://doi.org/10.1177/1542316620981834>
- Sunarto, S. E. R., Taum, Y. Y., & Adji, S. E. P. (2021). Kekerasan dalam Novel Lolong Anjing di Bulan Karya Arafat Nur: Perspektif Johan Galtung. *Sintesis*, 15(2), 98-112.
<https://doi.org/10.24071/sin.v15i2.3816>
- Wahyudi, T. (2013). Sosiologi Sastra Alan Swingewood Sebuah Teori. *Poetika*, 1(1).
<https://doi.org/10.22146/poetika.v1i1.10384>